

# 1. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

## IKU 1: Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Customer</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3	DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan [<i>compliance</i>] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian kegiatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>Pelaku usaha kelautan dan perikanan terdiri dari: pelaku usaha perikanan (usaha penangkapan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha distribusi hasil perikanan) dan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) dan ruang laut.</li> </ul>
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <math display="block">x_{kp} = (x_1 \times 50\%) + (x_2 \times 15\%) + (x_3 \times 20\%) + (x_4 \times 15\%)</math> </div> <p> <math>x_{kp}</math> = Kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  <math>x_1</math> = Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku  <math>x_2</math> = Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan WP3K dan ruang laut  <math>x_3</math> = Persentase kepatuhan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku  <math>x_4</math> = Persentase kapal perikanan yang patuh terhadap ketentuan Sistem Pemantauan </p>

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
		Kapal Perikanan Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembobotan diperoleh berdasarkan proporsi jumlah pelaku (unit) usaha pada masing-masing variabel dalam kurun waktu 2015-2017;</li> <li>• Perhitungan pada masing-masing komponen/variabel (<math>x_n</math>) terdapat pada informasi indikator kinerja di level unit Eselon II</li> </ul>
5	SATUAN PENGUKURAN	% (persen)
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kualitas
7	VALIDITAS	<i>Lag outcome</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Sumber data untuk mengetahui persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan berasal dari unit Eselon IV lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
10	STATUS DATA	Hasil perhitungan raw data
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Rata-rata
12	METODE CASCADING	Adopsi Langsung
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

**IKU 2: Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	<b>PERSPEKTIF</b>	<i>Internal Process</i>
2	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif
3	<b>DEFINISI</b>	Efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut, yang berupa: Permen, Kepmen, Kep.Dirjen, serta Surat Edaran
4	<b>FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN</b>	Survei +/- 50 sampai 100 responden untuk setiap kebijakan, yang terkena dampak implementasi kebijakan KKP. Kriteria Kebijakan yang di survey :telah diimplementasikan selama minimal 6 bulan; dan minimal 2 kebijakan untuk setiap Eselon I. Indeks Efektivitas diukur dengan 20 pertanyaan terkait kebijakan tersebut. Pilihan jawaban dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik)
5	<b>SATUAN PENGUKURAN</b>	Indeks
6	<b>JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	
7	<b>VALIDITAS</b>	<i>Lag outcome</i>
8	<b>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	<b>SUMBER DATA</b>	Data Survey dengan skala (1-10).
10	<b>STATUS DATA</b>	
11	<b>JENIS KONSOLIDASI DATA</b>	Nilai posisi akhir
12	<b>METODE CASCADING</b>	Adopsi Langsung
13	<b>KLASIFIKASI/POLARISASI</b>	Maximize

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
14	PERIODE PELAPORAN	Tahunan

**IKU 3: Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif
3	DEFINISI	Kebijakan publik adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo untuk menjabarkan standar, prosedur dan kriteria (SPK) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, standar operasional prosedur (SOP), dan lain-lain
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	Hitung jumlah total kebijakan publik bidang pengawasan yang telah ditetapkan/ditandatangani/diterbitkan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo dalam waktu satu tahun
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	
7	VALIDITAS	<i>Lead process/Lag output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Legalitas penerbitan dari Kasubbag Tata Usaha Pangkalan PSDKP Lampulo sedangkan substansi kebijakan publik bidang pengawasan SDKP berasal dari unit kerja teknis lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
10	STATUS DATA	
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Akumulasi
12	METODE CASCADING	Lingkup dipersempit

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

**IKU 4: Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES, PERMEN] yang diselesaikan**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif
3	DEFINISI	Draft Peraturan Perundang-undangan adalah rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengawasan SDKP yang akan ditetapkan melalui Permen KP, Kepmen KP, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	Hitung jumlah Draft Peraturan Perundang-Undangn bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan dalam satu tahun
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	
7	VALIDITAS	<i>Lead process/Lag output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Legalitas penerbitan dari Kasubbag Tata Usaha Pangkalan PSDKP Lampulo sedangkan substansi kebijakan publik bidang pengawasan SDKP berasal dari unit kerja teknis lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
10	STATUS DATA	
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Akumulasi
12	METODE CASCADING	Lingkup dipersempit
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

**IKU 5: Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase cakupan adalah persentase luas wilayah yang dapat di jangkau oleh patroli kapal pengawas perikanan minimal sekali dalam satu tahun dari total wilayah yang harus diawasi</li> <li>• WPP NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).</li> <li>• <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]</i> yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] dan Kapal Ikan Asing [KIA] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP-NRI</li> </ul>
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	Persentase cakupan WPPNRI yang terawasi dari <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan merusak SDKP diperoleh dari 2 (dua) komponen yakni: (1) Cakupan Pengawasan dengan Menggunakan Kapal Pengawas dan (2) Cakupan pengawasan dengan menggunakan pesawat patroli udara, dengan formulasi sebagai

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN	
	<p>berikut:</p> $x = \left( \frac{x_{kp} + x_{ps}}{2} \right) \times 100\%$ <p><math>x</math> : Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] yang terawasi dari <i>IUUfishing</i> (%)</p> <p><math>x_{kp}</math> : Cakupan Pengawasan dengan menggunakan kapal pengawas dan <i>speedboat</i></p> <p><math>x_{ps}</math> : Cakupan pengawasan dengan menggunakan pesawat patroli udara</p> <p>Dimana,</p> <p>1). <math>x_{kp} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot h_i}{A} \right\} \times 100\%</math></p> <p><math>n</math> : jumlah kapal pengawas dan <i>speedboat</i> beroperasi  <math>i</math> : indeks unit kapal pengawas/<i>speedboat</i>  <math>d</math> : jarak pandang rata-rata sesuai spesifikasi(nm)  <math>v</math> : kecepatan sesuai spesifikasi (nm/jam)  <math>t</math> : hari operasi (hari)  <math>h</math> : jam operasi (jam/hari)  <math>A</math> : Luas total area WPP NRI = 1.928.506 nm<sup>2</sup></p> <p>2). <math>x_{ps} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot h_i}{A} \right\} \times 100\%</math></p> <p><math>n</math> : frekuensi operasi udara  <math>i</math> : indeks operasi udara  <math>d</math> : jarak radar pesawat udara (nm)  <math>v</math> : kecepatan pesawat udara (nm/jam)  <math>t</math> : hari operasi udara (hari)  <math>h</math> : jam operasi atau endurance (jam/hari)  <math>A</math> : Luas total area WPP NRI = 1.928.506 nm<sup>2</sup></p>	
5	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	
7	VALIDITAS	<i>Lag Output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
9	SUMBER DATA	Kasie Sarana dan Prasarana
10	STATUS DATA	
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Akumulasi
12	METODE CASCADING	Buat Baru
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

**IKU 6: Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	Penyelesaian tindak pidana perikanan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)



INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
<p><b>4 FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN</b></p>	$X_{tpkp} = \frac{X_{tpk} + X_{tpp}}{2}$ <p><math>X_{tpkp}</math> = Persentase perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel (%)</p> <p><math>X_{tpk}</math> = Persentase perkara tindak pidana kelautan yang selesai disidik secara akuntabel (%)</p> <p><math>X_{tpp}</math> = Persentase perkara tindak pidana perikanan yang selesai disidik secara akuntabel (%)</p> <p>dimana;</p> $x_{tpk} = \frac{a}{b_{n-1}} \times 100\%$ <p><math>x_{tpk}</math> = Persentase perkara tindak pidana kelautan yang selesai disidik secara akuntabel (%)</p> <p><math>a</math> = Jumlah perkara tindak pidana kelautan yang telah selesai ditangani (P-12)</p> <p><math>b_{n-1}</math> = Jumlah perkara tingkat tindak pidana kelautan yang terjadi s/d 1 bulan sebelum bulan berjalan, yang telah diterbitkan SPDP dan Sprindik (kasus)</p> $x_{tpp} = \frac{a}{b_{n-1}} \times 100\%$ <p><math>x_{tpp}</math> = Persentase perkara tindak pidana perikanan yang selesai disidik secara akuntabel (%)</p> <p><math>a</math> = Jumlah perkara tindak pidana kelautan yang telah selesai ditangani (P-12)</p> <p><math>b_{n-1}</math> = Jumlah perkara tingkat tindak pidana kelautan yang terjadi s/d 1 bulan sebelum bulan berjalan, yang telah diterbitkan SPDP dan Sprindik (kasus)</p>
<p><b>5 SATUAN PENGUKURAN</b></p>	<p>Persen (%)</p>
<p><b>6 JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b></p>	
<p><b>7 VALIDITAS</b></p>	<p>Lag Output</p>

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
10	STATUS DATA	
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
12	METODE CASCADING	Adopsi Langsung
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Bulanan

**IKU 7: Tingkat keberhasilan pengawasan SDKP (Skala 1-10)**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
	partisipatif
3 DEFINISI	Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP adalah rata-rata (average) tingkat keberhasilan unit Eselon III teknis (non sekretariat) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada internal proses. Tingkat keberhasilan tersebut mencerminkan tingkat capaian dari target yang ditetapkan pada setiap IKU sasaran kegiatan (SS) pada level internal proses dengan skala tertentu (0-10)
4 FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$tks_n = \frac{a}{b} \times 10$ <p><math>tks_n</math> = Tingkat keberhasilan IKU pada sasaran kegiatan Unit Eselon II (dihitung terpisah pada setiap IKU sasaran kegiatan yang ada di setiap Unit Eselon II)</p> <p>a = Capaian sasaran kegiatan yang dihasilkan. Khusus untuk capaian yang “melebihi” target, maka dinormalisasi menjadi “mencapai” target.</p> <p>b = Target sasaran kegiatan yang ditetapkan.</p> $tk_{II} = \frac{tks_1 + tks_2 + \dots + tks_n}{n}$ $tk_I = \frac{tks_{II1} + tks_{II2} + \dots + tk_{II n}}{n}$ <p><math>tk_{II}</math> = Tingkat keberhasilan kumulatif unit Eselon II</p> <p>n = Jumlah IKU pada internal proses Eselon II</p> <p><math>tk_I</math> = Tingkat keberhasilan pengawasan SDKP</p> <p><math>tk_{II n}</math> = Tingkat keberhasilan kumulatif setiap Unit Eselon II</p> <p>n = Jumlah unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP</p>
5 SATUAN PENGUKURAN	Nilai
6 JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	
7 VALIDITAS	<i>Lag output/Lag outcome</i>
8 UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo

<b>INFORMASI INDIKATOR KINERJA</b>		<b>URAIAN</b>
<b>9</b>	<b>SUMBER DATA</b>	Capaian IKU seluruh unit eselon III lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>10</b>	<b>STATUS DATA</b>	
<b>11</b>	<b>JENIS KONSOLIDASI DATA</b>	Nilai Posisi Akhir
<b>12</b>	<b>METODE CASCADING</b>	Buat Baru
<b>13</b>	<b>KLASIFIKASI/POLARISASI</b>	Maximize
<b>14</b>	<b>PERIODE PELAPORAN</b>	Triwulanan

## IKU 8: Indeks Kompetensi dan Integritas Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Pangkalan PSDKP Lampulo yang kompeten, profesional dan berintegritas
3	DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi adalah kemampuan utk melaksanakan tugas sesuai dgn kemampuan &amp; pengetahuan</li> <li>• Integritas adalah kecendrungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma</li> <li>• Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kompetensi Hasil Asesmen, Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen</li> </ul>
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$KI = \frac{Komp_{Ases} + Komp_{SKP} + Komp_{Abs} + Komp_{LHKPN}}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KI : Indeks Kompetensi dan Integritas DJPSDKP</li> <li>• <math>Komp_{Ases}</math> : Dengan membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/asesmen dari Asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014</li> <li>• <math>Komp_{SKP}</math> : Persentase capaian output pegawai pada SKP</li> <li>• <math>Komp_{Abs}</math> : Persentase tingkat kehadiran pegawai</li> <li>• <math>Komp_{LHKPN}</math> : LHKASN/LHKPN (jabatan fungsional umum atau seluruh staf)/LHKPN (PBJ, KPA, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran/penerimaan, lihat di Permen 20 tahun 2013)</li> <li>• n : Jumlah variable</li> </ul>
5	SATUAN PENGUKURAN	Indeks
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	
7	VALIDITAS	<i>Lead input/Lag Output</i>

<b>INFORMASI INDIKATOR KINERJA</b>		<b>URAIAN</b>
<b>8</b>	<b>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>9</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil rekomendasi penilaian kompetensi/asesmen terhadap pejabat yang telah mengikuti <i>Assessment</i></li> <li>• SKP Pegawai</li> <li>• Finger Print Absen</li> <li>• LHKASN/LHKPN</li> </ul>
<b>10</b>	<b>STATUS DATA</b>	•
<b>11</b>	<b>JENIS KONSOLIDASI DATA</b>	Nilai Posisi Akhir
<b>12</b>	<b>METODE CASCADING</b>	Lingkup Dipersempit
<b>13</b>	<b>KLASIFIKASI/POLARISASI</b>	Maximize
<b>14</b>	<b>PERIODE PELAPORAN</b>	Triwulanan

**IKU 9: Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Tersedianya manajemen pengetahuan Pangkalan PSDKP Lampulo yang handal dan mudah diakses
3	DEFINISI	<p>Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</p> <p>Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang menshared data sesuai dengan data yang di distribusikan.</p>
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$MP = \frac{\sum_{Unit\ Kerja}}{\sum_{Total}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><math>\Sigma</math>Unit Kerja : Unit Kerja Level 1 dan 2 yang Menerapkan Sistem MP</p> <p><math>\Sigma</math>Total : Total Unit Kerja Level 1 dan 2 Keseluruhan</p>
5	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	
7	VALIDITAS	<i>Lead process/Lag Output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	<a href="http://www.sip.kkp.go.id">www.sip.kkp.go.id</a> dan <a href="http://www.djpsdkp.go.id">www.djpsdkp.go.id</a>

<b>INFORMASI INDIKATOR KINERJA</b>		<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>STATUS DATA</b>	
<b>1</b>	<b>JENIS KONSOLIDASI DATA</b>	Rata-rata
<b>1</b>	<b>METODE CASCADING</b>	Lingkup Dipersempit
<b>1</b>	<b>KLASIFIKASI/POLARISASI</b>	Maximize
<b>1</b>	<b>PERIODE PELAPORAN</b>	Triwulanan



## **IKU 10: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo**

<b>INFORMASI INDIKATOR KINERJA</b>		<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>PERSPEKTIF</b>	<i>Learning and Growth</i>
<b>2</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
<b>3</b>	<b>DEFINISI</b>	<p>Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).</p> <p>Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan : (1) integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional.</p> <p>Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>

<b>INFORMASI INDIKATOR KINERJA</b>		<b>URAIAN</b>
<b>4</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN</b>	Akan dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
<b>5</b>	<b>SATUAN PENGUKURAN</b>	Nilai
<b>6</b>	<b>JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	
<b>7</b>	<b>VALIDITAS</b>	<i>Lag Output</i>
<b>8</b>	<b>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>9</b>	<b>SUMBER DATA</b>	Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
<b>10</b>	<b>STATUS DATA</b>	
<b>11</b>	<b>JENIS KONSOLIDASI DATA</b>	Nilai Posisi Akhir
<b>12</b>	<b>METODE CASCADING</b>	Lingkup Dipersempit
<b>13</b>	<b>KLASIFIKASI/POLARISASI</b>	Maximize
<b>14</b>	<b>PERIODE PELAPORAN</b>	Triwulanan

## IKU 11: Level Maturitas SPIP Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN			
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>			
2	SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima			
3	DEFINISI	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo .			
		LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
		0	Belum Ada (Dalam Penataan)	$0 < \text{skor} < 1,0$	Belum memiliki kebijakan dan prosedur
		1	Rintisan	$1,0 \leq \text{skor} < 2,0$	Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan
		2	Berkembang	$2,0 \leq \text{skor} < 3,0$	Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi
		3	Terdefinisi	$3,0 \leq \text{skor} < 4,0$	Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
		4	Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{skor} < 4,5$	Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
		5	Optimum	$4,5 \leq \text{skor} \leq 5$	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
4	<b>FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN</b>	Berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP oleh BPKP pada Eselon I Tahun 2017 dengan mengadopsi langsung dari hasil evaluasi oleh BPKP. Dalam hal BPKP tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) dengan menggunakan pedoman dari BPKP.
5	<b>SATUAN PENGUKURAN</b>	Nilai (level)
6	<b>JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	
7	<b>VALIDITAS</b>	<i>Lead process/Lag Output</i>
8	<b>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	<b>SUMBER DATA</b>	BPKP dan Inspektorat Jenderal
1	<b>STATUS DATA</b>	
1	<b>JENIS KONSOLIDASI DATA</b>	Nilai Posisi Akhir
1	<b>METODE CASCADING</b>	Lingkup Dipersempit
1	<b>KLASIFIKASI/POLARISASI</b>	Maximize
1	<b>PERIODE PELAPORAN</b>	Triwulanan

### **IKU 12: Nilai AKIP Pangkalan PSDKP Lampulo**

<b>INFORMASI INDIKATOR KINERJA</b>		<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>PERSPEKTIF</b>	<i>Learning and Growth</i>
<b>2</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
<b>3</b>	<b>DEFINISI</b>	SAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
<b>4</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN</b>	Akan dilaksanakan oleh Itjen KKP dengan menggunakan instrumen sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KeMenpan RB
<b>5</b>	<b>SATUAN PENGUKURAN</b>	Nilai
<b>6</b>	<b>VALIDITAS</b>	<i>Lag Outcome</i>
<b>7</b>	<b>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>8</b>	<b>SUMBER DATA</b>	Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
<b>9</b>	<b>JENIS KONSOLIDASI</b>	Nilai Posisi Akhir

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
10	METODE CASCADING	Lingkup Dipersempit
11	KLASIFIKASI	Maximize
12	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

### **IKU 13: Nilai Kinerja Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo secara efisien dan akuntabel
3	DEFINISI	Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<p>Menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L:            Nilai Kinerja aspek implementasi :</p> $NK = (P \times W_p) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (E \times W_E)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)</li> <li>• K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi</li> </ul>

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
		<p>antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)</li> <li>• E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)</li> </ul>
5	<b>SATUAN PENGUKURAN</b>	Nilai
6	<b>VALIDITAS</b>	<i>Lag Outcome</i>
7	<b>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo
8	<b>SUMBER DATA</b>	Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan
9	<b>JENIS KONSOLIDASI</b>	Nilai Posisi Akhir
1	<b>METODE CASCADING</b>	Lingkup Dipersempit
1	<b>KLASIFIKASI</b>	Maximize
1	<b>PERIODE PELAPORAN</b>	Triwulanan

**IKU 14: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Lampulo dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo TA. 2017 (%)**

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo secara efisien dan akuntabel
3	DEFINISI	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan ( <i>adequate disclosures</i> ), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
4	<b>FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN</b>	<p><i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2017</i></p> <p><i>Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA.2017)</i></p> $= \frac{\text{Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2017}}{\text{Realisasi Riil}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2017 (<i>audited</i>) tidak melebihi 1 %</p>
5	<b>SATUAN PENGUKURAN</b>	Persen (%)
6	<b>VALIDITAS</b>	<i>Lead Process &amp;Lag Outcome</i>
7	<b>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo
8	<b>SUMBER DATA</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
9	<b>JENIS KONSOLIDASI</b>	Nilai Posisi Akhir
10	<b>METODE CASCADING</b>	Lingkup Dipersempit
11	<b>KLASIFIKASI</b>	Minimize
12	<b>PERIODE PELAPORAN</b>	Tahunan